

Peningkatan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Nur Arifin

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nusantara Bekasi/Inspektorat Jenderal

Kemenag RI

nurarifin69@gmail.com

ABSTRACT

Improving the quality of graduates of Islamic religious colleges (PTKI) is an urgent urgency for immediate improvement. Basically, quality improvement can be done with a strategy to change one of the subsystems: people, structure, technology, and organizational processes. In relation to the study of strategies for improving quality graduates in tertiary institutions, the changes were made to the human and technology subsystems, including: (1) students being educated; (2) lecturers as educators and lecturers; and (3) facilities and infrastructure. To get students with the best seeds, a selection system that only considers quality, not the target number of students, can be done so that the output (graduates) can compete in the labor market. In addition, national standardization of the level of student ability in mastering subjects needs to be carried out through the National Examination of the Study Program. Apart from being a teacher, a lecturer is also an educator who educates prospective scholars to become human beings who have the same qualities as the purpose of education. To carry out this function, lecturers must have a functional position and improve their abilities through education to the Masters or Doctoral level as well as various seminars or training activities. Likewise with the facilities and infrastructure, which includes student practical equipment in the laboratory or adequate computerization.

Keywords: Quality Improvement of Graduates, Higher Education

ABSTRAK

Peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) merupakan urgensi yang mendesak untuk segera dilakukan perbaikan. Peningkatan mutu itu pada dasarnya dapat dilakukan dengan strategi mengubah salah satu dari subsistem: manusia, struktur, teknologi, dan proses organisasi. Kaitannya dengan kajian strategi peningkatan lulusan bermutu di perguruan tinggi, perubahan itu dilakukan pada subsistem manusia dan teknologi, meliputi: (1) mahasiswa yang di didik; (2) dosen sebagai pendidik dan pengajar; dan (3) sarana dan prasarana. Untuk mendapat mahasiswa dengan bibit yang terbaik, dapat dilakukan dengan sistem seleksi yang hanya mempertimbangkan mutu, bukan target jumlah mahasiswa, agar output (lulusan) yang dihasilkan dapat bersaing di pasar bursa tenaga kerja. Selain itu, standarisasi secara nasional tingkat kemampuan mahasiswa dalam menguasai mata kuliah perlu dilaksanakan melalui ujian nasional Program Studi. Dosen selain sebagai pengajar, sekaligus sebagai pendidik yang mendidik calon sarjana menjadi manusia yang berahlak sebagaimana tujuan dari pendidikan. Untuk melaksanakan fungsi itu, dosen harus memiliki jabatan fungsional dan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan ke jenjang S2 ataupun S3 serta berbagai kegiatan seminar ataupun pelatihan. Begitupun dengan sarana dan

prasarana, yang meliputi perlengkapan praktek mahasiswa di laboratorium ataupun komputerisasi yang memadai.

Kata Kunci: *Peningkatan Mutu Lulusan, Perguruan Tinggi*

PENDAHULUAN

Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sudah sangat diperlukan, termasuk untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu/kualitas. Bagi para pemilik dan pengelola Perguruan Tinggi, sistem manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan sehingga dapat diserap oleh kalangan instansi dan pasar tenaga kerja. Krisis ekonomi dan moneter serta pasar bebas telah menuntut untuk lebih cermat dalam menentukan wawasan ke depan yang didasarkan atas pertimbangan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang menuntut untuk lebih efektif dan efisien dalam bertindak.

Sebagaimana diketahui bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas dari suatu produk. Produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen, sebaliknya apabila produk itu tidak bermutu maka akan ditinggalkan oleh konsumen. Begitupun juga perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu. Perguruan tinggi harus semakin fokus pada peningkatan mutu dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Para mahasiswa sebagai calon sarjana yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya mengharapkan hasil dari laboratorium itu memiliki nilai ganda yaitu ilmu pengetahuan, gelar, ketrampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur yang mampu bersaing di pasar global. Semuanya itu diperlukan sebagai persiapan memasuki dunia kerja dan atau persiapan membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan lahir serta batin.

Kenyataan yang ada pada dewasa ini menunjukkan mutu lulusan PTKI tidak selalu dapat diterima dan mampu untuk bekerja sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Maraknya perguruan tinggi berpotensi merosotnya mutu lulusan, mengingat standarisasi mutu lulusan tidak menjadi tujuan; tetapi hanya dilihat dari aspek kuantitas; yakni bagaimana mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Begitupun dengan diberlakukannya otonomi kampus, telah menyebabkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) memiliki kesamaan di dalam pengelolaan, sehingga ada kecenderungan untuk mencari dana yang memadai; namun terkadang mengabaikan aspek mutu itu sendiri.

Perguruan tinggi sebagai wadah untuk menggodog kader-kader pemimpin bangsa, memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan, karena dalam wadah ini berkumpul orang-orang yang berilmu dan beramal. Tanggung jawab pendidikan tidak saja beban pemerintah namun oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana manajemen perguruan tinggi diatur dalam suatu manajemen yang rapi, efisien dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah yang jelas yakni mutu lulusan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam prumusan naskah ini adalah metode penelitian literatur (*library reseach design*) yaitu sebagai studi perpustakaan karena digali dari dan diteliti dari bahan - bahan yang tertrulis. Dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantitatif (Strauss dan Corbin, 1997 : 11). Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian normatif dogmatif dan pendekatan penelitian sejarah atau *historical approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka pemerintah telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan yaitu (1) pemerataan dan kesempatan; (2) relevansi pendidikan dengan pembangunan; (3) kualitas pendidikan; dan (4) efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*).

Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan pembangunan tersebut, pendidikan akan dapat lebih mencapai hasil sesuai dengan misi, visi dan fungsinya. Upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi: kegiatan pendidikan dan pengajaran (proses belajar mengajar), kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Dharma Pendidikan, perlu dievaluasi relevansi program dan jurusan yang ada dalam kebutuhan

pembangunan, dalam arti apakah sumber daya manusia yang dihasilkan dapat diserap oleh kegiatan pembangunan bangsa.

Mengenai penyerapan lulusan perguruan tinggi ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang belum selesai, yang sebenarnya perbedaan tersebut adalah dalam melakukan pendekatan. Paling tidak ada dua pendekatan yang berbeda; yakni pendekatan dari dunia kerja dan pendekatan kalangan perguruan tinggi. Pendekatan pertama, menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak mampu bekerja sebagaimana yang di inginkan dunia kerja, yakni keahlian yang dimiliki masih jauh dari harapan.

Pendekatan pertama ini menginginkan, lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki keterampilan kerja (skill) yang memadai dan siap untuk bekerja. Kalangan perguruan tinggi sebenarnya tanggap dan merespon, sehingga disiapkan berbagai sarana dan prasarana, seperti komputerisasi; laboratorium, bengkel kerja dan pusat data. Namun pada kenyataannya dalam membentuk keahlian itu tidaklah memadai dan tidak menyebar secara merata di setiap perguruan tinggi.

Pendekatan ke dua, dari kalangan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Kecakapan dan keterampilan kerja (skill) itu memang tidak identik, keterampilan merupakan bagian dari kecakapan yang bisa dimiliki oleh calon lulusan.

Pada pendekatan ke dua ini memang, tujuan pendidikan itu tidak disiapkan hanya untuk siap kerja, tetapi jauh lebih luas, yakni menyangkut pembentukan peserta didik menjadi manusia seutuhnya dan keterampilan merupakan hal yang penting yang dapat dimiliki oleh seseorang. Namun demikian, seyogyanya perbedaan dua pendekatan yang berbeda ini harus dikembangkan melalui pemahaman yang mendalam agar tidak saling mengklaim dirinya yang paling benar, minimal dapat ditarik benang merahnya.

Pendidikan sebagai suatu proses, pertama mengenal adanya *raw-input* dan *instrumental input*. *Raw input* merupakan peserta didik sedangkan *instrumental input* terdiri dari: gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum, metode dan lain-lain. Kedua *raw input* dan *instrumental input* masuk dalam proses, yang ini akan memakan waktu delapan (8) semester. Ketiga, output (hasil didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap untuk masuk ke dalam persaingan sumber daya manusia. Dosen merupakan instrumen yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena dari dosenlah perpindahan ilmu dilakukan kepada peserta didik.

Perguruan tinggi yang memiliki tenaga-tenaga dosen yang berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Karena itu program untuk meningkatkan kualitas para dosen adalah merupakan kewajiban yang tidak ditawar-tawar lagi pada saat ini dan di masa mendatang. Perguruan tinggi yang tidak mau mengikuti arus perkembangan perubahan sekarang dan di masa datang akan ditinggalkan oleh masyarakat dan lambat atau cepat akan mengalami kemunduran, yang akhirnya akan mengalami keruntuhan.

Di sisi lain, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum dibagi dalam kurikulum inti dan kurikulum lokal (institusional). Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik, dalam penyelesaian suatu program studi. Di sisi lain kurikulum lokal (institusional) adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang bersangkutan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. (Pasal 38 ayat 3 dan 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

Mengenai pengembangan kurikulum ini, disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

- a. Peningkatan iman dan takwa.
- b. Peningkatan akhlak mulia.
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- f. Tuntutan dunia kerja.
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- h. Agama.
- i. Dinamika perkembangan global, dan
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (Pasal 36 ayat 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

Peningkatan Mutu Pendidikan

Agar pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka program studi yang tersedia seyogyanya harus sesuai dengan minat masyarakat, selaras dengan tuntutan jaman, calon mahasiswanya haruslah baik, tenaga pengajarnya berbobot, proses pendidikannya harus dapat berjalan dengan baik, serta sarana dan prasarananya harus memadai. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi antara lain:

1. Mahasiswa yang Dididik.

a. Seleksi Mahasiswa

Untuk dapat menghasilkan produk yang baik, maka harus menanam bibit-bibit yang baik. Untuk mendapatkan bibit yang baik perlu seleksi yang baik pula. Kendala yang dihadapi di hampir perguruan tinggi dalam mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai kualitas baik adalah terbentur dengan beberapa faktor misalnya dengan motto Universitas : *Biaya Terjangkau Mutu Terjamin*, yang harus tetap dilaksanakan. Sejarah pendirian suatu perguruan tinggi swasta adalah untuk menampung calon mahasiswa yang tidak bisa diterima di PTN, serta target penerimaan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Dengan demikian sistem seleksi yang belum mempertimbangkan segi mutu calon mahasiswa yang sesungguhnya, karena standar kelulusan untuk bisa diterima di suatu fakultas belum begitu ketat dilakukan.

Penerapan seleksi yang mengedepankan mutu dan target penerimaan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya masih menjadi pertimbangan yang belum bisa dilaksanakan. Satu sisi penting untuk menerima calon mahasiswa yang bermutu, tetapi dari sisi yang lain dihadapkan pada target minimal; yang juga sulit untuk menentukan jumlah minimalnya. Dengan mendapatkan jumlah mahasiswa yang memadai, maka perguruan tinggi itu akan memiliki dukungan dana yang kuat; karenanya cenderung menerima jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya.

Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, dari calon mahasiswa harus betul-betul dapat dijaring dengan seleksi yang ketat supaya calon mahasiswa yang diterima itu mempunyai standar kualitas yang baik karena bagaimanapun mahasiswa tidak lepas dari tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi. Selain itu tingkat kedisiplinan mahasiswa perlu ditingkatkan, karena melalui disiplin yang tinggi ini mahasiswa benar-benar dapat mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan ilmu pengetahuan yang diterimanya.

b. Pembinaan mahasiswa

Setelah memperoleh bibit unggul mahasiswa dari seleksi yang berkualitas, maka langkah selanjutnya adalah pembinaan mahasiswa yang benar. Sebab, walaupun seleksi mahasiswa telah dilaksanakan dengan baik dan berkualitas, namun setelah itu mahasiswa tidak memperoleh pembinaan yang baik dan sistematis, maka bibit unggul tadi bisa tidak menjadi unggul lagi.

Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa pembinaan mahasiswa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keunggulan mahasiswa hasil seleksi yang berkualitas tadi, antara lain melalui:

1) Standarisasi Kompetensi Program Studi

Otonomi kampus selama ini ternyata juga memiliki sisi yang tidak baik. Yaitu, ketika kampus memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan bahwa mahasiswa telah lulus dan kompeten terhadap mata kuliah sesuai dengan Program Studinya, telah membuat sebagian kampus begitu mudah memberikan nilai tinggi untuk kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah sesuai prodinya. Padahal, kalau diuji secara nasional, mungkin belum tentu mahasiswa tadi sudah lulus apalagi memperoleh nilai yang tinggi.

Oleh karena itulah, dalam rangka menjamin mutu dan memastikan bahwa kelulusan prodi telah sesuai secara standar nasional, perlu ada langkah ujian nasional mata kuliah program studi.

Mungkin kebijakan ini akan dianggap kontroversial, dan menuai tantangan dari berbagai pihak. Akan tetapi Standarisasi Mutu Program Studi perlu dilaksanakan, agar kepercayaan publik pada lulusan perguruan tinggi dapat diwujudkan secara merata. Oleh karena itu ujian nasional prodi bisa dilaksanakan secara bertahap.

2) Organisasi

Setelah mahasiswa lulus dari perguruan tinggi, pasti mereka kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan bermasyarakat, antara lain melalui kegiatan organisasi, baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus.

Namun demikian, kegiatan organisasi ini tidak boleh dibiarkan tanpa arah pembinaan yang jelas. Karena, kalau tidak ada sistem pembinaan organisasi mahasiswa yang baik, akan berdampak negatif, yaitu kegiatan organisasi mahasiswa justru menjadi benih-benih perpecahan mahasiswa di kampus.

3) Tuntutan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

Seringkali telah terdengar para akademisi yang baru lulus kesulitan untuk memperoleh profesi yang selaras dengan jurusannya, bahkan ada yang bertahun-tahun menganggur dan kemudian mengambil pekerjaan meskipun itu tidak sesuai dengan bidang pendidikannya.

Ketidaksiapan memasuki dunia kerja, salah satunya karena faktor pendidikan. Beberapa aspek penyelenggaraan pendidikan formal kurang memberikan bekal yang cukup. Dunia pendidikan hanya memfokuskan pada aspek akademisnya, dan belum menyentuh aspek praktis.

KKNI merupakan kerangka acuan yang dijadikan ukuran dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Menurut Perpres No. 08 tahun 2012, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KKNI merupakan program studi yang mengharuskan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi memperjelas profil lulusannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisa kebutuhan masyarakat.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sistem yang dianut oleh setiap Perguruan Tinggi haruslah berangsur diubah. Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk pengembangan inovasi terhadap suatu tuntutan tersebut. Respon terhadap perubahan kurikulum ini dapat dilihat dari banyaknya aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perpres No. 08 tahun 2012 dan Pemendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI, UU PT No. 12 tahun 2012 pasal 29 tentang Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI, Permenristek dan Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kurikulum ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan yang memenuhi kriteria seperti:

1. Dalam aspek Attitude
2. Bidang kemampuan kerja
3. Pengetahuan
4. Managerial dan Tanggung Jawab

Dengan adanya target pencapaian ini, Perguruan Tinggi harus mampu menjabarkan sebuah capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil kelulusan. Untuk menjamin mutu para lulusan perguruan tinggi secara nasional sesuai standar KKNI perlu dibuat kebijakan Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional setiap Prodi berdasarkan standar KKNI.

2. Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar

Dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk menyampaikan ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dengan kajian bidang ilmu yang dipilihnya. Kaitannya dengan kualifikasi ini, seorang dosen senantiasa minimal telah mendapat penyetaraan jabatan fungsional. Semakin tinggi jabatan fungsional dosen ini menunjukkan tingkat kualifikasi seseorang, baik dari aspek prestasi ataupun prestisenya.

Selain itu dosen juga harus mempunyai disiplin yang tinggi, juga mempunyai rasa tanggung jawab terhadap ilmu yang diberikan kepada mahasiswa. Bagaimana mungkin dapat meningkatkan mutu pendidikan apabila dosen hanya memberikan kuliah 3 - 4 kali pertemuan dalam setiap semesternya. Jadi dosen harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak didiknya agar ia tidak hanya memberikan kuliah secara asal-asalan.

Tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang, perubahan-perubahan mendasar pada kurikulum dan metode belajar mengajar akan timpang dan bisa jadi kurang efektif. Peningkatan kualitas dosen perlu dimulai dari sistem perekrut, peningkatan kemampuan dosen, sistem penilaian terhadap kemampuan dan kinerja dosen, serta sistem peningkatan karirnya. Tentu saja upaya peningkatan kualitas dosen perlu disertai dengan peningkatan kesejahteraannya.

Kemampuan dosen itu meliputi kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang akan diajarkan dan teknik dalam memberikan pengajaran. Hal ini berarti peningkatan kemampuan dosen perlu dilakukan dari dua aspek yaitu peningkatan ilmu pengetahuan di bidangnya, dan kemampuan atau ketrampilan dalam mengajar; yakni menggunakan metode pembelajaran secara tepat.

Selain itu juga dapat dilihat dari klasifikasi pendidikan (S2/S3) dan jenjang jabatan akademiknya. Pengelolaan mutu dosen dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan ke strata yang lebih tinggi di PTN maupun PTS terbaik di dalam maupun diluar negeri secara bertahap dan berencana. Masalah mendasar yang biasa dihadapi dosen di dalam melanjutkan pendidikan ke S2 atau ke S3 menyangkut biaya pendidikan dan relevansi disiplin ilmu. Pengelola pendidikan senantiasa lebih peduli dengan peningkatan kualitas dosen ini, dengan memberikan dukungan dana yang memadai di dalam anggaran pendapatan dan belanja Universitas.

Disamping itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan-kegiatan seminar (lokal, regional dan nasional), simposium, diskusi, serta penataran-penataran dan lokakarya, baik di fakultas dan universitas sendiri, maupun di perguruan tinggi terkemuka di tanah air. Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan dinas-dinas, dunia usaha dan dunia industri dalam kaitannya dengan program keterkaitan dan kesepadanan sebagai penambah wawasan dan cara berpikir serta ketrampilan bagi dosen.

Dengan adanya keterkaitan secara sinerji antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha/industri; maka ketimpangan mutu lulusan perguruan tinggi merupakan tanggung jawab bersama; yang sama-sama harus dipikul. pemerintah memberikan fungsi pembinaan dan pengaturan, dunia usaha/industri menyerap lulusan dan perguruan tinggi menyiapkan lulusannya dengan standaisai mutu guna mengisi dunia kerja itu.

3. Sarana dan Prasarana.

Untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha/industri sebagai penyerap dan pemakai tenaga lulusan perguruan tinggi Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan unsur mahasiswa, alumni dan perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha, untuk memberikan masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu berkiprah di era globalisasi. Untuk itu, maka perlu perbaikan terhadap kurikulum dengan menambahkan program-program baru seperti: penguasaan bahasa internasional, teknologi komputer, program magang dan etika.

Laboratorium sebagai ajang latihan dan praktek mahasiswa perlu dilengkapi dengan fasilitas yang cukup serta program pelatihannya harus disesuaikan dengan perkembangan dunia industri dan jasa. Sedangkan perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi perlu diperkaya dan dilengkapi dengan berbagai jurnal dan literatur yang terbaru. Sarana komputerisasi dan perangkat yang lengkap memungkinkan mahasiswa dapat melakukan interaksi secara global; termasuk menggali pengetahuan lewat internet.

Demikian pula gedung atau ruang perkuliahan serta perlengkapannya sebagai penunjang proses pendidikan dan pengajaran sangat perlu mendapat perhatian dari segi kebersihan, keindahan serta kenyamanannya.

KESIMPULAN

Dari uraian sebagaimana kajian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

- a. Peningkatan lulusan bermutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu dilakukan secara terus menerus, terutama pada aspek: (1) mahasiswa yang di didik; (2) dosen sebagai pendidik dan pengajar; dan (3) sarana dan prasarana.
- b. Untuk memperoleh mahasiswa yang unggul perlu dilaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu calon mahasiswa. Dan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas mahasiswa maka antara lain perlu dibuat kebijakan standarisasi kelulusan program studi dengan melaksanakan ujian nasional program studi.
- c. Pengelola PTKI perlu mendorong upaya peningkatan kualifikasi tenaga dosen dengan pendidikan lanjutan ke S2 dan S3 atau kegiatan kampus dengan fasilitas yang memadai agar kualitas sumberdaya dapat ditingkatkan sehingga secara otomatis akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi.
- d. Tuntutan terhadap mutu pendidikan yang terus ditingkatkan sebagai upaya untuk menciptakan *output* yang berkualitas dan siap terjun ke pasar kerja serta untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
- e. *Output* yang dihasilkan harus berdasarkan suatu proses yang matang dan didukung oleh *input* yang baik pula.
- f. Kerjasama yang sinergi dalam mendukung proses penyelenggaraan dan sumber daya perguruan tinggi guna meningkatkan mutu pendidikan harus mendapat perhatian pemerintah, dunia usaha/ industri dan pengelola pendidikan. Adapun saran yang dapat diajukan meliputi antara lain:
 1. Menyusun perencanaan pengembangan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 serta penyediaan sarana kampus dengan sarana yang memadai untuk proses kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
 2. Upaya untuk menciptakan *output* yang berkualitas dan siap terjun ke pasar kerja serta untuk memenuhi standar nasional pendidikan senantiasa perlu mendapat perhatian pengelola perguruan tinggi.
 3. Guna menghasilkan *output* mutu yang memadai, diperlukan *input* melalui seleksi penerimaan mahasiswa yang baik, bukan hanya mencapai target jumlah mahasiswa tetapi *input* calon mahasiswa itu sendiri. Mengembangkan mutu mahasiswa dengan berbagai organisasi, serta mahasiswa didituntut untuk dapat memenuhi KKNI.

Jurnal Drosah Islamiyah

**Volume 3 Nomor 2 (2021) 180-192 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683
DOI: 10.17467/jdi.v3i2.356**

4. Agar tercipta kerjasama yang sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri dan pengelola pendidikan, diperlukan pendekatan khusus agar dapat tercipta pemahaman yang sama; bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab semua.

REFERENSI

Artawan, Made I. 2002. *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi*.
Website : I.Made Artawan.co. id.

Asmawi, Rosul M. 2001. *Peningkatan Mutu Lulusan di FISIP UNIS Tangerang*.
Tangerang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh-
Yusuf Tangerang.

Indraijaya, Adam I. 1989. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung : Sinar
Baru.

Robbins, Stephen P. Terj. Yusuf Udaya. 1994. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan
Aplikasi*. Jakarta : Arcan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem
Pendidikan Nasional*.

<http://geotimes.co.id/opini/penerapan-kurikulum-berbasis-kkni-di-perguruan-tinggi/> diakses tanggal 15 Mei 2018.